

KUOTA

Impor dari China naik 226 %

Santika ekspansi Hotel Amaris

JAKARTA: Grup Santika terus mengembankan jaringan hotel kelas bintang dua dan tiga, menyusul pengoperasian Hotel Amaris di Senen yang menelan investasi lebih dari Rp18 miliar.

Hotel Amaris Senen dengan konsep *bed and breakfast* ini merupakan jaringan ke-15 Amaris atau hotel ke-35 di bawah Grup Santika. Di Jakarta, hotel yang membidik pasar pebisnis dan wisatawan domestik itu juga dibangun di Karet dan Casablanca.

Guido Andriano, Corporate Director Of Sales and Marketing Santika Indonesia, mengatakan Hotel Amaris juga akan diopekasikan di Bogor pada tahun ini, adapun di luar Jawa masih dalam tahap persiapan, seperti di Kalsel, Ambon, Makasar, Pekanbaru, Bali, dan Palangkaraya.

"Pengembangan bisnis perhotelan bintang dua dan tiga dalam 2 tahun mendatang masih potensial," katanya sesuai pembukaan Hotel Amaris Senen, kemarin. (BISNIS/TRI)

MAP buka Denim Destination

JAKARTA: PT Mitra Adiperka Tbk (MAP), membuka Denim Destination di Debenhams Department Store Senayan City, untuk memenuhi kebutuhan pencinta denim di dalam negeri, dengan konsep khusus dan sangat orisinal untuk premium denim.

"Selama ini banyak permintaan terhadap produk premium denim. Untuk menjawab permintaan itu, kami menghadirkan Denim Destination sebagai rumah denim dengan luas 800 m² di lantai 2 Debenhams Senayan City," kata Fetty Kkwartati, Corporate Secretary MAP, di sela-sela pegelaran produk terbaru Denim kemarin malam.

Dia mengatakan untuk tahap pertama Denim Destination ini akan menampilkan 16 merek denim terkemuka di dunia. Di antaranya ada True Religion, 7 For all mankind, Rock & Republic, Ben Sherman, DL 1961, dan Dr. Denim. (BISNIS/YR)

OLEH NATALINA KASIH WASIYATI & SEPUDIN ZUHRI
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Implementasi Asean-China Free Trade Agreement telah menimbulkan berbagai persoalan di Tanah Air. Total impor dari China semakin membesar diperkirakan naik 226,32% sejak 2005.

Berdasarkan penelitian Institute for Global Justice (IGJ), selama periode 2005-2010, total impor dari China meningkat 226,32%. Komposisinya mencapai 20,32% dari total impor Indonesia. Data tersebut juga menunjukkan sepanjang 2006-2008 tercatat 1.650 industri bangkrut karena tidak sanggup bersaing dengan produk China yang membanjiri pasar di dalam negeri. Akibatnya, sebanyak 140.584 tenaga kerja terpaksa kehilangan pekerjaan karena perusahaan gulung tikar.

Direktur Eksekutif IGJ Indah Suksmaningsih mendesak pemerintah untuk menghentikan perjanjian perdagangan bebas Indonesia-China untuk sementara waktu menyusul dampak merugikan yang diderita industri dalam negeri.

Kemudian, kata Indah, pemerintah harus renegosiasi terkait ACFTA dan meminta berhenti un-

tuk sementara waktu dari kesepakatan tersebut sampai industri nasional siap. "Renegosiasi dan berhenti sementara waktu dari kesepakatan sangat penting karena Indonesia pada kenyataannya tidak siap menghadapi ACFTA," katanya akhir pekan lalu.

Indah menilai dalam menghadapi ACFTA tersebut, pemerintah tidak kompak. Dia mencontohkan Kementerian Perindustrian yang begitu gencar menyuarakan penolakan dan desakan agar kesepakatan kerja sama tersebut ditinjau ulang, tetapi di sisi lain Kementerian Perdagangan cenderung mengedepankan mekanisme protokol bilateral dalam menyelesaikan masalah.

"Untuk mewujudkan renegosiasi tersebut, harus ada sinergi antarkementerian terkait, apalagi momen pertemuan Asean 7-8 Mei mendatang di Jakarta seharusnya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk renegosiasi perjanjian tersebut," ujarnya.

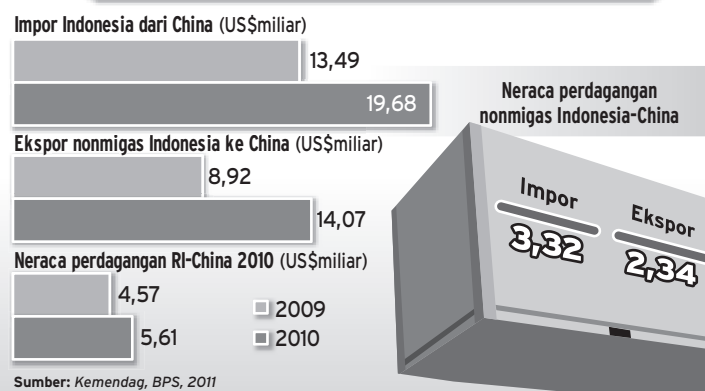
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa mengatakan pemerintah harus bergerak cepat untuk merespons keluhan para pengusaha soal ada praktik dumping yang dilakukan oleh China.

Erwin mengusulkan pemerintah harus mengenakan tarif tambahan jika dari hasil investigasi itu ada industri atau produk yang terbukti terpuak dampak perjanjian perdagangan bebas itu.

Dia menilai persoalan tersebut harus diselesaikan secara bilateral oleh kedua negara untuk

Pemerintah tidak kompak hadapi ACFTA

Hubungan dagang Indonesia China



menghasilkan solusi yang saling menguntungkan. Kedatangan Perdana Menteri China Wen Jiabao ke Indonesia, menurut Erwin, momentum yang bagus untuk membicarakan persoalan perdagangan ini.

Pemerintah lanjut dia, harus bisa menegosiasikan ulang dengan Pemerintah China khususnya dalam pemberian *tax rebate* (potongan pajak) untuk ekspor China ke Indonesia, selain itu juga meminta Negeri Tirai Bambu itu untuk bisa berinvestasi di Indonesia.

"Jadi jangan ada potongan pajak untuk ekspor ke Indonesia karena itu dumping terhadap produk mereka. Selain itu, China harus berinvestasi mendirikan pabrik dan membangun infrastruktur di Indonesia," katanya.

Menurut dia, serbuan produk China ke Indonesia saat ini semakin menjadi-jadi. Pengusaha Chi-

na juga mulai mengirim produk-produk yang selama ini diproduksi oleh industri kecil dan menengah di Indonesia.

"Masa produk seperti kerudung dan tasbih juga harus beli dari China. Kasih pengusaha lokal kalau produk seperti itu juga harus bersaing dengan China," ujarnya.

Tidak menolong

Ina Primiana, Ketua Ikatan Sarjanan Ekonomi Indonesia Jabar mengatakan ketika ACFTA akan diberlakukan banyak yang pesimis bahwa ini akan semakin mendorong terhadap deindustrialisasi, termasuk Kementerian Perindustrian.

"Karena industri kita belum siap, tetapi Kementerian Perdagangan tetap optimis. Setelah lebih dari 1 tahun berlalu, ternyata terbukti. Produksi dalam negeri kalah. Semakin banyak produ-

sen yang beralih menjadi pedagang, karena tidak berisiko," ujarnya.

Tanpa ACFTA pun, kata dia, sejak 2007 jumlah perusahaan di berbagai sektor terus menurun dan tenaga kerjanya kena PHK. Belum sempat dibenahi dan diperkuat, perjanjian ACFTA sudah harus dimulai pada 2010. "Tidak ada pertolongan nyata yang dilakukan pemerintah selama ini untuk mempertahankan dan memperkuat produksi dalam negeri."

Misalnya, kata dia, pertama tidak ada penyediaan infrastruktur transportasi yang terintegrasi, yang memudahkan bagi pelaku usaha agar menghilangkan biaya yang tidak perlu. "Biaya logistik di Indonesia saat ini termasuk tinggi," tuturnya.

Kedua, suku bunga yang tinggi bisa mencapai 16% dibandingkan dengan negara lain yang di bawah 5%, belum lagi menurunnya kredit perbankan ke industri. Ketiga, kelangkaan sumber utama dan sumber penolong (energi, bahan baku atau bahan penolong. "Ini semua, tentunya menjadikan biaya produksi tinggi dan berdampak terhadap harga jual. Harga jual inilah yang menjadi penyebab utama tidak mampu bersaing dengan produk China. Soal kualitas, produk Indonesia mampu bersaing," ujarnya. (A. DADAN/MARTIN SIHOMBING) (natalina.kasih@bisnis.co.id) (sepudin.zuhri@bisnis.co.id)

• 11 Sektor dapat... Hal. 8



PT INTRACO PENTA, Tbk ("PERSEROAN")

PEMBERITAHUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut Rapat) telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 15 April 2011
Waktu : 09.30 s/d selesai
Tempat : InterContinental Hotel Jakarta Mid Plaza
Grand Ball Room
Jl. Jendral Sudirman Kav 10-11
Jakarta 10220

Dalam Rapat tersebut pada pokoknya telah menyetujui dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPS Tahunan:

- Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2010.
- Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 20266115A, tanggal 28 Februari 2011 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan serta Laporan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2010.
- Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2010 sebesar **Rp. 83.081.383.677,-** digunakan untuk:
 - Pembagian dividen untuk tahun buku 2010 yang akan dibayarkan atas **432.005.844** saham yaitu sebesar **Rp. 56,-** untuk setiap saham atau seluruhnya sebesar **Rp. 24.192.327.264,-**
 - Membentuk dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UU PT sebesar **Rp 50.000.000,-**
 - Sisanya sebesar **Rp. 58.839.056.413,-** dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
- Pemberian kuasa kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk memilih dan menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Bapepam untuk tahun buku 2011 serta pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya
- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada **Westwood Finance Inc** selaku pemegang **27,05 %** saham Perseroan untuk menentukan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan tugas dan wewenang dan jenis serta besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, masing-masing terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan diselenggarakannya RUPS Tahunan pada tahun 2011.

RUPS Luar Biasa

- Menyetujui dan menerima baik rencana Perseroan untuk: Merubah Pasal 1 ayat 1, dan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan:
 - Diperolehnya Fasilitas Kredit dari PT. Bank Mandiri Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri serta pemberian jaminan;
 - Penandatanganan dan pelaksanaan Corporate Guarantee atau Pernyataan Dan Kesanggupan (*Cash Deficit Guarantee*) terkait dengan Fasilitas Kredit yang diterima anak perusahaan PT Karya Lestari Sumberalam dan PT.Terra Factor Indonesia.
 - Sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian-Perjanjian tersebut diatas, Perseroan dapat menjamin harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh Perseroan dikemudian hari termasuk antara lain: fidusia, transfer atas asset-asset Perseroan, tagihan, jaminan, ganti kerugian (*Indemnity*) untuk kepentingan kreditor dari Perseroan dan/atau kreditor anak perusahaan, baik yang sudah diberikan maupun akan diberikan kepada kreditor dan/atau kreditor anak perusahaan berdasarkan Perjanjian-Perjanjian tersebut atau perjanjian-perjanjian fasilitas pendanaan lain dikemudian hari antara Perseroan dan kreditor dan/atau kreditor anak perusahaan.
 - Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menentukan dan memutuskan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian-Perjanjian, maupun amandemen dan/atau addendum dari Perjanjian-Perjanjian dikemudian hari antara Perseroan dengan kreditor dan/atau kreditor dari anak perusahaan

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN

- Jadwal Pembagian Dividen
 - Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 9 Mei 2011
 - Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 10 Mei 2011
 - Cum dividen di Pasar Segera dan Pasar Tunai : 12 Mei 2011
 - Ex dividen di Pasar Segera dan Pasar Tunai : 13 Mei 2011
 - Recording Date yang berhak atas dividen tunai : 12 Mei 2011
 - Pembayaran dividen tunai : 27 Mei 2011
- Tatacara Pembayaran Dividen
 - Pembayaran dividen dimulai tanggal **27 Mei 2011**, yang dilakukan dengan ketentuan:
 - Bagi saham dalam penitipan kolektif KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia), pembayaran dan pendistribusian dividen tunai kepada para pemegang saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI.
 - Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dititipkan pada KSEI atau pemegang saham dengan warkat, pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening pemegang saham yang bersangkutan. Untuk itu pemegang saham dengan warkat diminta untuk memberitahukan rekening banknya sesuai dengan nama yang tertera di DPS kepada Perseroan paling lambat tanggal **12 Mei 2011** sampai pukul 16.00 WIB.
 - Pajak atas dividen yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan sesuai ketentuan undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
 - Sehubungan dengan pembayaran dividen diusulkan untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan.

Jakarta, 18 April 2011
Direksi Perseroan

Pemerintah diminta bentuk tim evaluasi layanan TKI

OLEH R. FITRIANA
Bisnis Indonesia

JAKARTA: Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia meminta pemerintah mengevaluasi kinerja pelayanan TKI dengan membentuk tim terpadu yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Rusjdi Basalamah mengatakan evaluasi kinerja jasa pelayanan bagi TKI itu hendaknya ditekankan pada hasil yang sudah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak jauh berbeda isinya.

Laporan BPK tentang Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2010 kepada DPR dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR pada 5 April 2011 menyebutkan efektivitas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tidak tercapai secara optimal, karena kompleksitas masalah.

"Posisi asosiasi jelas mendukung

pernyataan presiden yang akan mengkaji semua lini penempatan agar tidak semakin rusak, terlebih lagi pada infrastruktur penempatan yang ada," jelasnya, kemarin.

Rusjdi menuturkan penempatan TKI ke luar negeri tidak didukung dengan kebijakan yang utuh, komprehensif, dan transparan untuk melindungi hak-hak dasar TKI. Contohnya, perbaikan sistem pelatihan hanya sebagai konsumsi publik, yakni lembaga teknis membuat sesuatu tetapi kenyataannya tidak ada perbaikan substansi dan sistemnya.

"Kami bicara berdasarkan fakta di lapangan bukan berdasarkan pernyataan pada masyarakat dengan data yang tidak faktual," tukasnya.

Mengenai pernyataan Presiden, Rusjdi menilai hal itu mengindikasikan kepala negara mengetahui dua instansi teknis yang ada tidak dapat diharapkan menyelesaikan masalah TKI yang ada.

Saat ini, katanya, Presiden mengevaluasi secara menyeluruh atas kinerja kedua instansi tersebut, yakni Kemenakertrans dan Badan

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Sebelumnya, Analisis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan sudah melakukan evaluasi atas kinerja Kemenakertrans dan BNP2TKI yang hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil evaluasi BPK dan KPK.

Dia menuturkan pihaknya sejak awal mengatakan keduanya tidak layak dilanjutkan dan laporan BPK dan KPK beberapa waktu lalu hendaknya menjadi momentum untuk membenahi secara total pada penempatan dan perlindungan TKI.

Sementara itu, mengenai pemulangan TKI bermasalah dan warga negara Indonesia overstayers (kelembihan izin tinggal) dari Arab Saudi, Tim Khusus DPR akan berada di Jeddah pada 20-24 April 2011.

Tim khusus itu akan memantau langsung proses pemulangan sebanyak 2.927 orang WNI/TKI overstayers dan TKI bermasalah dengan menggunakan Kapal Motor Labobar PT Pelni dari Pelabuhan Jeddah pada 23 April.

PT BII FINANCE CENTER

Wisma Ekajawa Lt.10, Jln.Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat
Telp. (021) 62300088, Fax. (021) 62300099

| NERACA | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Per Tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 (Dalam Rupiah) | | |
| POS-POS | 2010 | 2009 |
| ASET | | |
| Kas dan Setara Kas | 14.978.320.241 | 14.339.743.783 |
| Penanaman Neto Sewa | - | - |
| Pembiayaan-bersih | 436.038.539 | 59.708.669 |
| Penanaman Neto Pembiayaan | - | - |
| Konsumen-bersih | 328.404.809.301 | 136.075.844.580 |
| Piutang Lain-lain-bersih | 92.344.825.161 | 14.872.967.721 |
| Aset Pajak Tangguhan | 771.694.028 | - |
| Biaya Dibayar Dimuka | 9.125.253.272 | 50.083.252.974 |
| Penyerahan Saham-bersih | - | 1.089.000.000 |
| Aset Tetap-bersih | 10.296.020.100 | 4.314.591.548 |
| Aset Lain-lain | 362.854.501 | 375.697.846 |
| JUMLAH ASET | 456.719.815.144 | 221.210.807.121 |
| KEWAJIBAN | | |
| Hutang Bank | 4.000.000.000 | 30.535.319.636 |
| Hutang Pajak | 6.769.990.713 | 2.716.062.979 |
| Hutang Lain-lain | 116.837.560.571 | 126.517.753.024 |
| Biaya yang Masih Harus Dibayar | 10.581.648.864 | 2.619.415.140 |
| Surat Hutang Jangka Menengah (medium term notes) | 223.604.110.610 | - |
| Kewajiban Manfaat Pensiun | 641.951.461 | 531.289.947 |
| Jumlah Kewajiban | 362.435.262.219 | 162.919.840.726 |
| KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN | - | 48.534.221 |
| EKUITAS | | |
| Modal Saham - nilai nominal Rp. 1.000 per saham. | - | - |
| Modal Dasar - 60.000.000 lembar saham | - | - |
| Modal Ditempatkan dan Disetor - 15.000.000 lembar, | 15.000.000.000 | 15.000.000.000 |
| Saldo Laba | 79.284.552.925 | 43.242.432.174 |
| Jumlah Ekuitas | 94.284.552.925 | 58.242.432.174 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 456.719.815.144 | 221.210.807.121 |

Catatan :

Laporan Keuangan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dalam laporannya tertanggal 20 Januari 2011.

Jakarta, 18 April 2011

PT BII FINANCE CENTER
Direksi